



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002

BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

FORM BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

Nomor: 473.12/ 006.1 /I/2018

Tanggal 8 Januari 2018

Berdasarkan pasal 19 Undang-undang Nomor :14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan. Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di kantor Kecamatan Bontang barat, Kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Bontang Barat telah mengadakan uji konsekuensi informasi public yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi sebagai berikut:

NO	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN	JANGKA WAKTU
1	BA.Proses penyelesaian Sengketa/Konflik Lingkungan	Pasal 17 huruf a UU No. 14/2008	Sampai dgn diserahkan kpd Penuntut (jaksa)
2	Surat-surat momerandum disposisi dan nota dinas di Lingkungan Kecamatan Bontang Barat	Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 ttg KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Selama belum ada tindak lanjut dari pengolah surat
3	Laporan keuangan Kecamatan Bontang Barat yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal	- Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 ttg KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
4	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	- Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2), dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - UU No.15/2004 ttg Perbendaharaan Negara; - UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara	Selama masih berlaku

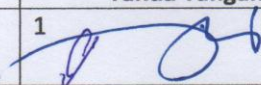
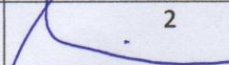
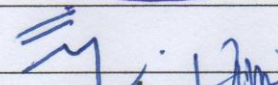
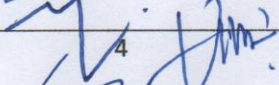

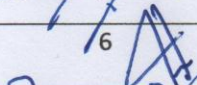
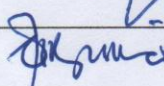


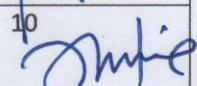
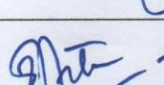
5	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
6	Data Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database pengelolaan Keuangan Daerah	1. Pasal 17 huruf e & huruf j UU No. 14/2008 ttg KIP; 2. UU no. 11/2008 ttg ITE	Tidak terbatas
7	Data pribadi Penduduk	- Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008; - Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 86 ayat (1), (1a) dan (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Selama belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang
8	Data Identitas Penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008	Tidak terbatas (kecuali atas izin tertulis PMKS)
9	Daftar SKP Pegawai	1. Pasal 17 huruf l UU No.14/2008; 2. UU No.43/1999 ttg kepegawaian	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang
10	Surat Tanah	Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah NO. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada bagian kesepuluh tentang penyajian informasi data fisik dan yuridis “..hanya kepada pemegang hak yang dapat diberikan salinan batas bidang tanah”	Selama belum ada bukti kepemilikan tanah dari pihak yang meminta informasi dan surat permintaan data yang berkekuatan hukum
11	Surat Keterangan Ahli Waris	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008;	Selama belum ada izin dan bukti ahli waris dari pemohon informasi.
12	LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	- Pasal 17 huruf a UU No.14/2008	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
13	Sanksi Hukuman Disiplin tertulis	- Pasal 17 huruf h UU No.14/2008 -Lampiran I perka BKN Nomor 21 Tahun 2010	Tidak terbatas kecuali kepada yang punya kepentingan secara hukum

14	Aplikasi	- Pasal 17 huruf c UU No.14/2008 dan Pasal 34 UU No.11/2008	Tidak Terbatas
15	Kode Password User Aplikasi dan Jaringan	- Pasal 17 huruf c UU No.14/2008 dan Pasal 34 UU No.11/2008	Tidak Terbatas

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut diatas dari Poin 1 s/d 20 disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi public dalam golongan informasi yang dikecualikan dengan alasan mengacu pada Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan UU atau Peraturan lain yang berlaku.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Tim Penguji

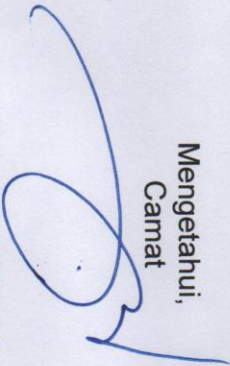
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sutrisno,SE,M.Si	Camat	1 
2	Rafidah,SE,M.Si	Sekretaris	2 
3	Engon Tumiar Manik,SE	Kasi Prasarana Sarana Pelayanan Umum	3 
4	Kamil,SE	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	4 
5	Mustamin,S.Pd.I	Kasi Tata Pemerintahan	5 
6	Andi Nurpatmawati,SH	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	6 
7	Dra.Ufra	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	7 
8	Ardiansyah	Kasubbag Umum	8 
9	Arni Fahriana,SE	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	9 
10	Herlina Binti Rustam,S.Kom	Pranata Komputer PPID Kecamatan Bontang barat	10 
11	Vita Vanti,S.Kom	Pranata Komputer PPID Kecamatan Bontang barat	11 

**DAFTAR PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI MENURUT KELOMPOK
KECAMATAN BONTANG BARAT**

NO	INFORMASI YANG BERSIFAT TERBUKA DAN SECARA BERKALA	INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT	INFORMASI SECARA SERTA MERTA	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	INFORMASI YANG DIPEROLEH BERDASARKAN PERMINTAAN
1	Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah	Visi Misi	Bencana Alam	BA. Proses penyelesaian Sengketa/Konflik Lingkungan	
2	Perwali Kota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan	Jam Pelayanan	Bencana Non Alam	Surat-surat momerandum disposisi dan nota dinas di Lingkungan Kecamatan Bontang Barat	
3	Lakip Kecamatan Bontang Barat	Persyaratan Pelayanan PATEN	Bencana Sosial	Laporan keuangan Kecamatan Bontang Barat yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal	
4	Profil dan monografi per semester	RENJA	Wabah Penyakit	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	
5	Data Penduduk Kecamatan Bontang Barat	Daftar Inventarisasi asset		Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	
6	IKU Kecamatan Bontang Barat	SIRUP		Data Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database pengelolaan Keuangan Daerah	

NO	INFORMASI YANG BERSIFAT TERBUKA DAN SECARA BERKALA	INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT	INFORMASI SECARA SERTA MERTA	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	INFORMASI YANG DIPEROLEH BERDASARKAN PERMINTAAN
7	Restra Kecamatan Bontang Barat	Struktur Organisasi		Data pribadi Penduduk	
8	Data Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Bontang Barat			Data Identitas Penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)	
9				Daftar SKP Pegawai	
10				Surat Tanah	
11				Surat Keterangan Ahli Waris	
12				LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	
13				Sanksi Hukuman Disiplin tertulis	
14				Aplikasi	
15				Kode Password User Aplikasi dan Jaringan	
16				Akses VPN	

Mengetahui,
Camat

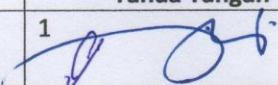
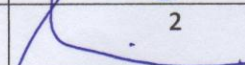
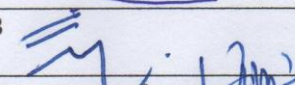
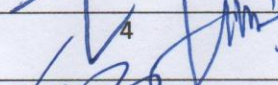
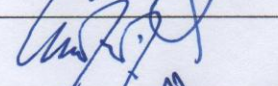
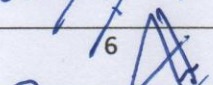
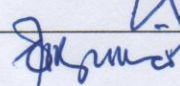
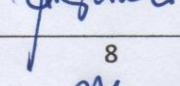

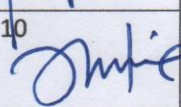


Sutrisno, SE, M.Si

Pembina TK.I

Nip. 196511041988031007

Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sutrisno,SE,M.Si	Camat	1 
2	Rafidah,SE,M.Si	Sekretaris	2 
3	Engon Tumiar Manik,SE	Kasi Prasarana Sarana Pelayanan Umum	3 
4	Kamil,SE	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	4 
5	Mustamin,S.Pd.I	Kasi Tata Pemerintahan	5 
6	Andi Nurpatmawati,SH	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	6 
7	Dra.Ufra	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	7 
8	Ardiansyah	Kasubbag Umum	8 
9	Arni Fahriana,SE	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	9 
10	Herlina Binti Rustam,S.Kom	Pranata Komputer PPID Kecamatan Bontang barat	10 
11	Vita Vanti,S.Kom	Pranata Komputer PPID Kecamatan Bontang barat	11 